



Politik Pangan: Ketahanan Nasional Dan Tren Diplomasi Kekinian

Siti Masrurroh¹, Irham Bashori Hasba^{2*}, Rasyid Musdin³

¹ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

^{2, 3} Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia.

 : irbash@syariah.uin-malang.ac.id

 : [10.47268/balobe.v2i2.1091](https://doi.org/10.47268/balobe.v2i2.1091)



Info Artikel

Keywords:

Food; Diplomacy; International Agreements.

Kata Kunci:

Pangan; Diplomasi; Perjanjian Internasional.

Abstract

Introduction: Food availability is the main starting point in supporting the country's economy. Scarcity of food will have an impact on economic stability in each sector. Countries with superior availability of materials and food production will certainly have absolute advantages, including the state's freedom to determine materials and food production, determine prices, and trade commodities on an international scale. Therefore, food is often a medium of diplomacy and a bargaining power over other countries. **Purposes of the Research:** Analysis tool on food as part of national security on the one hand, and food as a diplomatic tool between countries on the other.

Methods of the Research: This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a theoretical approach, and an analytical approach. Primary materials using Law no. 24 of 2000 and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Secondary materials in the form of journals and documents that support research.

Results of the Research: It is at the heart of a research report because a finding is what the reader is actually looking for. The findings component does not have to present all the things that are found in the research, it is presented that the findings are relevant to the nature of this research. For example: The results show that or The findings of this study prove that businesses that reached their dominant position before the recession had a significant advantage over small businesses. However, they cannot be compelled to act on the same basis for very long, which is why a more US-like model would be useful for controlling some of these business behaviors.

Abstrak

Latar Belakang: Ketersediaan pangan menjadi titik tolak utama dalam menunjang perekonomian negara. Kelangkaan bahan pangan akan berdampak pada stabilitas ekonomi disetiap sektor. Negara dengan keunggulan ketersediaan bahan dan produksi pangan dapat dipastikan akan memiliki keuntungan absolut, termasuk adanya keleluasaan negara dalam menentukan bahan dan produksi pangan, penentuan harga, dan komoditas perdagangannya dalam skala internasional. Oleh karenanya, pangan seringkali menjadi media diplomasi dan menjadi daya tawar atas negara lain.

Tujuan Penelitian: Alat analisa atas pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional disatu sisi, dan pangan sebagai alat diplomasi antar negara pada sisi lainnya.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,

pendekatan teori, dan pendekatan analisis. Bahan primer menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Bahan sekunder berupa jurnal dan dokumen yang mendukung penelitian.

Hasil Penelitian: Merupakan inti dari laporan penelitian karena temuan merupakan sesuatu yang sesungguhnya dicari oleh pembaca. Komponen temuan tidak harus menyajikan semua hal yang ditemukan dalam penelitian, yang disajikan adalah temuan yang memang relevan dengan hakikat penelitian ini. Misalnya: Hasil penelitian menunjukkan bahwa atau Temuan penelitian ini membuktikan bahwa usaha yang mencapai posisi dominan mereka sebelum resesi memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan usaha kecil. Namun, mereka tidak dapat secara terpaksa bertindak atas dasar yang sama untuk waktu yang lama, itulah sebabnya mengapa model yang lebih mirip dengan Amerika Serikat akan bermanfaat untuk mengontrol beberapa perilaku usaha ini.

A. PENDAHULUAN

Dinamika hukum internasional saat ini begitu fleksibel dan sangat bergantung pada perkembangan global serta isu-isu yang berkembang dalam berbagai spektrum sesuai dengan interaksi antar pemimpin masing negara-negara, terutama negara yang dipandang memiliki pengaruh besar dan memainkan peran penting dalam interaksi tersebut. Keberadaan aturan dalam interaksi antar negara sebenarnya telah ada bahkan sejak peradaban kuno, terutama ketika terjadi interaksi dan relasi timbal balik antar masyarakat dan negara. Praktik interaksi antar negara melahirkan adanya dialog budaya, adat-istiadat, ekonomi, politik dan berbagai aturan dan kesepakatan-kesepakatan bersama, serta pemberian jaminan perlindungan dan kekebalan hukum bagi para pemimpin tertentu dalam rangka untuk memudahkan hubungan kedua belah pihak, termasuk penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur non militer dan mengutamakan dialog banyak dilakukan termasuk oleh bangsa Cina Kuno dan peradaban dunia Islam¹.

Tradisi negara-negara Yunani Kuno, hukum internasional dikenal dengan *Intermunicipal Law* yakni kebiasaan yang disepakati bersama dan menjadi adat antar negara-negara seperti lahirnya perwakilan (diplomat) pada jaman modern yang menjadi perwakilan negara tertentu di suatu negara dalam rangka untuk mengupayakan kerjasama perekonomian, perdamaian dan hal lainnya dari suatu negara dengan negara lainnya, yang bahkan keberadaannya dilindungi dan memiliki kekebalan hukum².

Dalam perkembangan peradaban manusia, diplomasi digunakan untuk memberi berbagai macam sumber informasi sekaligus solusi akhir dalam mengakhiri konflik. Strategi, kepandaian, dan taktik yang sempurna dalam melaksanakan diplomasi menjadikan diplomasi sebagai salah satu seni dalam membangun hubungan antara satu negara dengan negara lain. Kendatipun demikian, jika

¹ Ariadno, Melda Kamil, *Hukum Internasional; Hukum Yang Hidup* (Jakarta: Diaditmedia, 2007), h. 175

² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: SinarGrafika, 2014), h. 9

diplomasi damai tidak dapat menjadi alternatif, penggunaan kekuatan, ancaman dan kekerasan dalam mencapai tujuan diplomasi dapat diperbolehkan sehingga perang dapat menjadi alat diplomasi dalam persoalan dunia internasional³.

Selain persoalan diatas, pengembangan perlengkapan perang juga menjadi salah satu media diplomasi untuk memperoleh kedamaian negara. Sejarah panjang pengembangan nuklir Korea Utara merupakan satu bukti bahwa keberadaan senjata nuklir dapat menciptakan keamanan sekaligus media diplomasi atas intimidasi negara lain. Pada masa perang Korea Tahun 1950-an, Amerika Serikat memberikan ancaman nuklir terhadap China yang saat itu turut serta membantu Korea Utara. Pada 1955-1958, ancaman yang sama juga diterima China saat terjadi konflik antara China-Taiwan. Kemudian pada tahun 1964, peluncuran uji coba nuklir pertama berhasil dilakukan oleh China, hal ini kemudian mendapat perhatian Amerika dan memperbaiki hubungannya dengan China. Uji coba nuklir yang sering dilakukan Korea Utara sejak 1993 sampai saat ini, selalu mendapatkan penekanan oleh Amerika Serikat dan PBB. Kendatipun demikian, upaya nuklir tersebut tercatat pernah berhasil mempertemukan Korea Utara dan Amerika Serikat dalam jalur diplomasi⁴.

Selain persoalan penguatan alat perang, diplomasi dapat terjadi dengan menggunakan aspek kebudayaan. Pada 2 Oktober 2015, saat pelaksanaan festival batik di Tokyo, Indonesia mampu menciptakan kemeriahan, penduduk lokal yang hadir memberikan apresiasi lebih dan berefek pada ekspor batik Indonesia di internasional. Diplomasi kebudayaan sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama berkelanjutan menjadi salah satu batu pijakan bahwa budaya mampu mempererat kerjasama internasional⁵.

Pandemi Covid 19 menempatkan stabilitas kondisi dunia buruk. Hampir seluruh negara di dunia merasakan dampaknya yang sangat signifikan. Pandemi Covid 19 yang menjadi keresahan bersama menuntut seluruh negara menanggalkan ego dan kepentingan personal dan bahu-membahu melawan pandemi hingga akhirnya berangsur-angsur pulih. Upaya pemulihan atas dampak pandemi yang tengah berlangsung, masyarakat dunia kembali dikejutkan dengan melambungnya harga energi dan bahan pangan karena terdampak langsung perang Rusia dan Ukraina yang cukup memberi dampak kejut dan berefek domino terhadap kondisi global, meski dalam menyikapi perkara tersebut, sikap berbagai negara di dunia terbelah. Efek kejut tentu sangat terasa karena kedua negara tersebut memiliki peran penting atas kelangsungan rantai pasok energi, gas, minyak, gandum, jagung, pupuk, maupun komoditas lainnya secara global. Alhasil, kelangkaan energi, minyak dan sumber pangan, terutama gandum dan jagung tidak dapat dihindari. Awal tahun 2022, melalui konverensi internasional pada PBB khususnya bidang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Ukraina dan Rusia secara aktif mampu memenuhi

³ Rendi Prayuda, Rio Sundari, "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis," *Journal of Diplomacy and International Studies* 2, no. 1 (2019): 80-93, h. 84 <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/issue/view/308>

⁴ Andi Purwono, Ahmad Saifuddin Zuhri, "Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional," *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* 7, no. 2 (2010): 1-18, h. 7-9

⁵ Sri Wulan Destriyani, DKK, "Strategi Diplomasi Budaya Untuk Meningkatkan Ekspor Batik Indonesia Ke Jepang," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 1, no. 2 (2020): 107-119, h. 118

setengah pasar global biji-bijian dan gandum. Perang keduanya memberikan dampak kenaikan terhadap perdagangan dunia⁶.

Pemaparan tersebut diatas, terutama terkait keberadaan pangan yang menjadi sentral kebutuhan seluruh dunia menegaskan bahwa pangan menjadi titik tolak utama dalam menunjang perekonomian negara. Kelangkaan atas pangan mengakibatkan instabilitas pangan dan ekonomi global. Dalam analisisnya, David Ricardo mengatakan bahwa negara yang memiliki keunggulan atas bahan produksi, secara khusus memperoleh keuntungan yang absolut⁷. Absolutitas tersebut memberikan keleluasaan bagi negara untuk menentukan bahan produksi, harga pangan, dan perdagangan internasional, termasuk sebagai alat ampuh dalam ranah diplomasi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa diplomatisasi pangan menjadi upaya penting dalam memberikan kelangsungan terhadap negara dengan tingkat produksi pangan yang memadai. Argumentasi ini cukup berdasar mengingat tingginya kebutuhan manusia atas pangan tidak sebanding dengan sarana pemenuhannya⁸. Berangkat atas asumsi tersebut pula, penulis memiliki ketertarikan untuk menjadi topik tersebut sebagai problem riset dalam penelitian ini dengan berfokus pada pangan sebagai ketahanan nasional dan media diplomasi internasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), pendekatan teori (*Theoretical Approach*), dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Bahan hukum primer berasal dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Adapaun bahan sekunder berasal dari jurnal dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pangan Sebagai Ketahanan Negara

Ketahanan negara tidak hanya terletak pada seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki. Seiring dengan kondisi dunia akhir-akhir ini, masalah pangan justru sudah seharusnya ditempatkan pada posisi penting dalam menentukan arah kebijakan nasional maupun internasional suatu negara. Prof. Dr. Miyasto menyebutkan bahwa komoditas pangan selain mampu menjaga kestabilan nasional, juga mampu menumbuhkan kemandirian serta persaingan ekonomi di dalam negeri hingga pasar internasional⁹.

Stabilisasi atas pangan sebagai dasar pijakan bahwa negara mampu berdaya saing untuk membangun arah kebijakan dan ekonomi nasional, tidak menutup

⁶ <https://unctad.org/news/war-ukraine-raises-global-shipping-costs-stifles-trade>

⁷ <https://policonomics.com/ricardian-trade-theory/>

⁸ Sugiarto, Dkk, *Ekonomi mikro: Sebuah Kajian Komprehensif* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 49

⁹ Miyasto, "Strategi Ketahanan Pangan Nasional Guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Jurnal Lemhannas RI* 2 no. 1 (2014), 17-34, h. 18

kemungkinan ekonomi nasional yang sudah maju, sekaligus dapat menunjang berbagai kekurangan-kekurangan sektor lain. Pengurangan terhadap komoditi asing, reformasi agrarian, redistribusi agrarian kepada pemilik lahan merupakan langkah kongkrit dalam membangun ketahanan pangan. Dalam proses kesejahteraan rakyat dan pangan lokal dapat berjalan bersama untuk memanusiaikan manusia¹⁰.

Berangkat dari paradigm diatas, sudah barang tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan negara. Oleh sebab itu, terpenuhinya satu komponen dalam negara, akan menyebabkan upaya pemenuhan pada komponen lain. Dari ketahanan pangan, maka tercipta pula ketahanan negara yang kokoh dan bebas dari pengaruh asing. Uraian diatas dimaksud bahwa kokohnya pangan dan kuatnya pertahanan negara, mengakibatkan perlu adanya ekspor pangan ke dunia internasional.

2. Pangan Sebagai Media Diplomasi Internasional

Ketersediaan pangan yang berlebih, selain menunjang perekonomian dan ketahanan negara, juga mampu menjadi nilai tawar dalam perdagangan internasional, melalui diplomasi dan perjanjian. April 2021, Indonesia mengekspor hasil pertanian dengan nilai mencapai 27,32 miliar US\$/meningkat hingga mencapai 47,76% (YonY) sedangkan dibulan sebelumnya hanya mencapai 44,65%¹¹. Kondisi ini memungkinkan bahwa ketahanan pangan negara dapat tercapai sekaligus diplomasi pangan internasional. David Ricardo mengatakan bahwa negara yang memiliki keunggulan atas bahan produksi, secara khusus memperoleh keuntungan absolut¹². Absolutitas tersebut memberikan keleluasaan bagi negara untuk menentukan bahan produksi, harga pangan, dan perdagangan internasional. Jika dianalisis lebih jauh lagi, gagasan ini menjadikan dasar perdagangan internasional yang dikenal dengan istilah keuntungan komparatif.

Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa dalam rangka untuk mengesahkan *tractat*, perlu dibuat undang-undang perjanjian internasional khusus yang berkaitan dengan keamanan, perpolitikan, pertahanan, keamanan setiap negara, perubahan batas wilayah negara, kedaulatan negara, HAM dan lingkungan hidup, pinjaman atau hibah, kaidah hukum terbaru¹³. Berangkat dari gagasan Ricardo serta komparatif analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, pangan menjadi bagian perdamaian dalam diplomasi internasional.

Diplomasi pangan menjadi titik pertemuan antara kebutuhan pangan yang meningkat dan kurangnya bahan produksi untuk diperoleh masyarakat, alhasil negara dengan tingkat produksi rendah membutuhkan sumber pangan untuk stabilitas negara. Terpenuhinya ekonomi dalam negeri mendorong ketahanan pangan sekaligus memperkokoh kedaulatan negara, dengan demikian ekspor pangan dapat dilakukan.

Diplomatisasi melalui sekaligus pendistribusian pangan melalui ekspor, dapat dijadikan sebagai media perdamaian dan politik internasional bagi negara. Senada dengan uraian diatas, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) menyebutkan bahwa hak yang dimiliki setiap negara dalam upaya pangan salah satunya adalah *pertama*, setiap negara

¹⁰ Atmaezer H. Simanjuntak, Rudy G. Erwinsyah, "Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid19: Telaah Kritis Terhadap Perencanaan Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia," *Jurnal Sosio Informa* 6, no. 2 (2020), 184-204, h. 199

¹¹ <https://kominformojatimprov.go.id/berita/april-2022-ekspor-pertanian-tumbuh-15-89-persen>

¹² <https://policonomics.com/ricardian-trade-theory/>

¹³ Lihat Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

memiliki hak dalam memberikan biaya atas hambatan tarif impor sebagai bagian dari upaya perlindungan petani/pertanian lokal selama tidak melebihi tarif yang disepakati bersama, *kedua*, negara yang berada dalam kategori berkembang memiliki hak untuk memperdagangkan maupun mendistribusikan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan program pengaturan harga ketahanan pangan (*administered prices*), *ketiga*, pendistribusian subsidi melalui bantuan pangan kepada rakyat miskin.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, negara pengekspor dikenakan biaya tambahan guna melindungi pertanian/petani di negara pengimpor. Dengan kata lain, jika negara yang memiliki ketahanan pangan melakukan impor, sudah barang tentu mampu memainkan peran dalam penambahan biaya barang. Posisi ini memberikan keuntungan lebih terhadap negara yang memiliki pangan berlimpah dan melakukan impor kepada negara lain.

Negara dengan cadangan pangan melimpah dan secara konsisten melakukan distribusi, memiliki peran besar dalam memainkan diplomasi atas negara yang kekurangan bahan pangan. Oleh sebab itu, pangan sebagai media diplomasi memberikan perhatian atas keberlangsungan sumberdaya sebuah negara melalui ketersediaan pangan. Alhasil, negara dengan pangan yang melimpah diuntungkan dalam skala internasional, terkhusus Indonesia jika mensoal pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

D. PENUTUP

Keberadaan pangan menjadi titik tolak utama dalam menunjang perekonomian negara. Kelangkaan atas pangan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi internasional. Negara yang memiliki keunggulan atas bahan produksi, secara khusus memperoleh keuntungan absolut. Absolutitas tersebut memberikan keleluasaan bagi negara untuk menentukan bahan produksi, harga pangan, dan perdagangan internasional, termasuk sebagai media diplomasi. Pengurangan terhadap komoditi asing, reformasi agrarian, redistribusi agrarian kepada pemilik lahan merupakan langkah kongkrit dalam membangun ketahanan pangan. Dalam proses kesejahteraan rakyat dan pangan lokal dapat berjalan bersama untuk memanusiaikan manusia. Tercipta pula ketahanan negara yang kokoh dan bebas dari pengaruh asing. Uraian diatas dimaksud bahwa kokohnya pangan dan kuatnya pertahanan negara, mengakibatkan perlu adanya ekspor pangan ke dunia internasional. Negara dengan cadangan pangan melimpah dan secara konsisten melakukan distribusi, memiliki peran besar dalam memainkan diplomasi atas negara yang kekurangan bahan pangan. Oleh sebab itu, pangan sebagai media diplomasi memberikan perhatian atas keberlangsungan sumberdaya sebuah negara melalui ketersediaan pangan. Alhasil, negara dengan pangan yang melimpah diuntungkan dalam skala internasional, terkhusus Indonesia jika mensoal pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

REFERENSI

Ariadno, Melda Kamil. *Hukum Internasional; Hukum Yang Hidup*. Jakarta: Diaditmedia, 2007.

Destriyani, Sri Wulan. Lusi Andriyani, Usni Usni. "Strategi Diplomasi Budaya Untuk Meningkatkan Ekspor Batik Indonesia Ke Jepang," *INDEPENDEN: Jurnal Politik*

¹⁴ Lihat *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*

Indonesia dan Global 1, no. 2 (2020)

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Miyasto, "Strategi Ketahanan Pangan Nasional Guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Jurnal Lemhannas RI* 2 no. 1 (2014)

Prayuda, Rendi. Rio Sundari. "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis," *Journal of Diplomacy and International Studies* 2, no. 1 (2019).
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/issue/view/308>

Purwono, Andi. Ahmad Saifuddin Zuhri. "Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional," *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* 7, no. 2 (2010).

Simanjuntak, Atmaezer H. Rudy G. Erwinsyah, "Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid19: Telaah Kritis Terhadap Perencanaan Megaprojek Lumbung Pangan Nasional Indonesia," *Jurnal Sosio Informa* 6, no. 2 (2020)

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: SinarGrafika, 2014

Sugiarto. Tedy Herlambang. Brastoro. Rachmat Sudjana. Said Kelana. *Ekonomi mikro: Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2005

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

<https://unctad.org/news/war-ukraine-raises-global-shipping-costs-stifles-trade>

<https://policonomics.com/ricardian-trade-theory/>

<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/april-2022-ekspor-pertanian-tumbuh-15-89-persen>

<https://policonomics.com/ricardian-trade-theory/>